

ABSTRAK

“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA BATU HIU “

**Oleh :
Muhamad Deni Raihan
NPM : 213507510**

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan apabila terdapat ketepatan pada pengelolaannya. Dokumen Peraturan daerah tentang RIPPARDA dan juga Perbup dengan realitas lapangan tidak menunjukkan kesesuaian baik pada proses implementasi dan juga dampak yang diberikan tidak terlihat secara nyata. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana pemerintah kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan pada sektor pariwisata yang mana dalam penelitian ini objek penelitian adalah salah satu objek wisata yang berada di kabupaten Pangandaran yakni Batu Hiu dari mulai awal perumusan hingga pada tahap pelaksanaannya. Manfaat secara akademis akan diperoleh oleh *civitas* akademik dan manfaat praktis sebagai rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dalam pengelolaan objek wisata. Pendekatan secara kualitatif dengan beberapa tahapan validasi data dan melalui observasi langsung, wawancara dan analisis dokumentasi. Dalam analisisnya penelitian ini menggunakan unit analisis dari William N.Dunn yang mana seperti Relevansi, Efektivitas, efisiensi, akuntabel, proses implementasi, keadilan, dan dampak hingga pada akhirnya memunculkan sebuah saran dan rekomendasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa RIPPARDA Kabupaten Pangandaran, meski berpotensi untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Batu Hiu, belum efektif diimplementasikan. Terdapat kesenjangan signifikan antara rencana dan praktik, khususnya pada keterlibatan masyarakat dan transparansi. Kebijakan retribusi juga belum optimal. Tingkat implementasi RIPPARDA masih sangat rendah karena keterbatasan anggaran, koordinasi lemah, dan kurangnya pemanfaatan pedoman. Peningkatan kunjungan wisatawan lebih disebabkan oleh faktor lain. Pengelolaan destinasi belum inklusif dan sosialisasi minim. RIPPARDA membutuhkan komitmen kuat, anggaran, koordinasi, serta perbaikan implementasi dan pengawasan agar tujuannya tercapai.

Kata Kunci : Kebijakan, Politik, Pariwisata

Abstract

Tourism is one of the sources of revenue with highly promising potential, provided that it is managed appropriately. However, the Regional Regulation on the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARDA) and the related Regent Regulation (Perbup) do not align with the realities in the field, both in terms of implementation and the tangible impact. This study aims to examine and describe how the Pangandaran Regency Government manages the tourism sector, focusing specifically on Batu Hiu as the research object from the initial policy formulation to the implementation stage. The academic benefit of this research is expected to contribute to academic discourse, while the practical benefit lies in providing policy recommendations for more inclusive tourism management. This study employs a qualitative approach, with several data validation stages including direct observation, interviews, and document analysis. The analysis uses William N. Dunn's policy evaluation model, which includes aspects such as relevance, effectiveness, efficiency, accountability, implementation process, equity, and impact, leading to the formulation of suggestions and recommendations. The findings indicate that although RIPPARDA in Pangandaran Regency has the potential to support sustainable tourism development in Batu Hiu, it has not been effectively implemented. There is a significant gap between planning and practice, especially in terms of community involvement and transparency. The tourism retribution policy is also not yet optimal. The level of RIPPARDA implementation remains very low due to budget limitations, weak coordination, and underutilization of the policy guidelines. The increase in tourist visits is mainly driven by other factors. Destination management is still not inclusive, and public dissemination of the policy is minimal. RIPPARDA requires stronger commitment, adequate funding, better coordination, and improvements in implementation and oversight to achieve its objectives.

Keyword : Policy, Politic, Tourism